



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
Situs www.ptun-jayapura.go.id, e-mail ptun.jayapura@gmail.com

Jayapura, 11 September 2024

Nomor : 1055/KPTUN.W8-TUN3/OT1.6/IX/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Agustus 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

M A N A D O

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Bulan Agustus Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KE T U A,

JUSAK SINDAR

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	16
1. Struktur Organisasi.	16
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	17
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	31
A. Kesimpulan.	31
B. Rekomendasi.	31
LAMPIRAN	32
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	33
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	36
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	39
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	41
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	43

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorar yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	29
Tabel 30.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Agustus secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

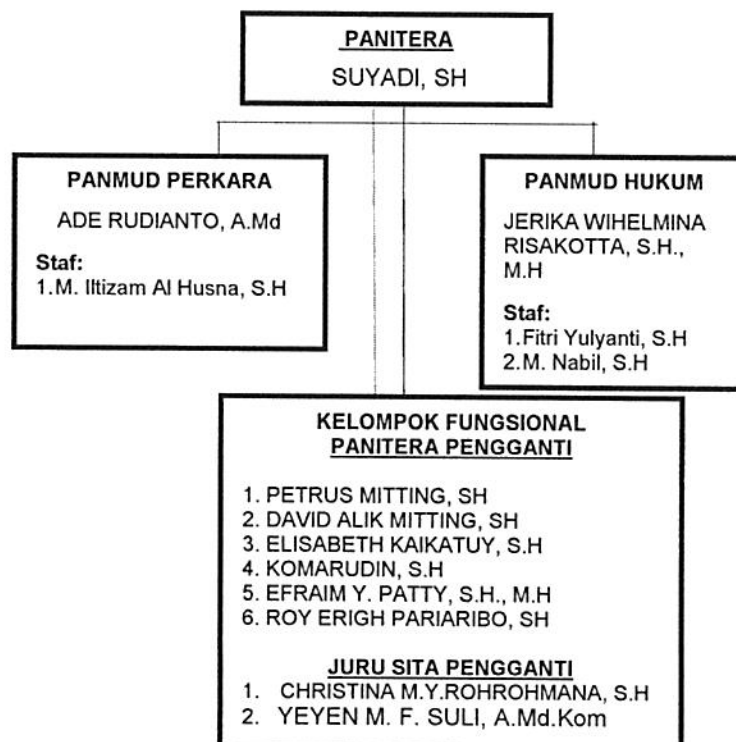
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Agustus Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Agustus Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	11	3	3	9	1	-	-	1
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Agustus Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	5	2	7
2	Kepegawaian	2	1	3
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	4	-	4
Total		11	3	14

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Agustus Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28,762,000	-	-	28,762,000
2	Penerimaan	-	2,783,500	-	2,783,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	136,000	136,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	630,000	630,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	390,000	390,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	1,019,000	1,019,000
9	Materai	-	-	50,000	50,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	90,000	90,000
	b. Redaksi	-	-	50,000	50,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	278,500	278,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	2,222,000	2,222,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28,762,000	2,783,500	5,240,500	26,305,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Agustus Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	8,070,500	-	-	8,070,500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	8,070,500	375,000		8,445,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Agustus Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,295,000	-	-	1,295,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	160,000	160,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	50,000	50,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	25,000	25,000
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,295,000	500,000	295,000	1,500,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Agustus Tahun 2024 adalah 53,85%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Agustus Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Indri Anggelia	12-08-2024	Salinan Putusan Banding Perkara 29 PTUN JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
2	Oriuenes Ijie	15-08-2024	Salinan Putusan Perkara No. 18/G/2023/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Agustus 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Abihud Waromi	Konsultasi Hukum Terkait Sertifikat Ganda	1 Jam	-
2	Susanty Manullang	Konsultasi Hukum Terkait Hak Waris	1 Jam	-
3	Diana Adadikam	Konsultasi Hukum Terkait Pelari Atlit	1 Jam	-
4	Siti Komariah	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
5	Cornelius Sampe	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
6	Yuswardi	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
7	Demianus Sada	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
8	Rafael Ridwan May	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
9	Rusdi Boeng	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
10	M. Fasmari	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-
11	Paliki Towolom	Konsultasi Hukum Terkait Pemilu Penggelembungan Suara	1 Jam	-
12	Yustinus Tura	Konsultasi Hukum Terkait Perselisihan Hubungan Industrial	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

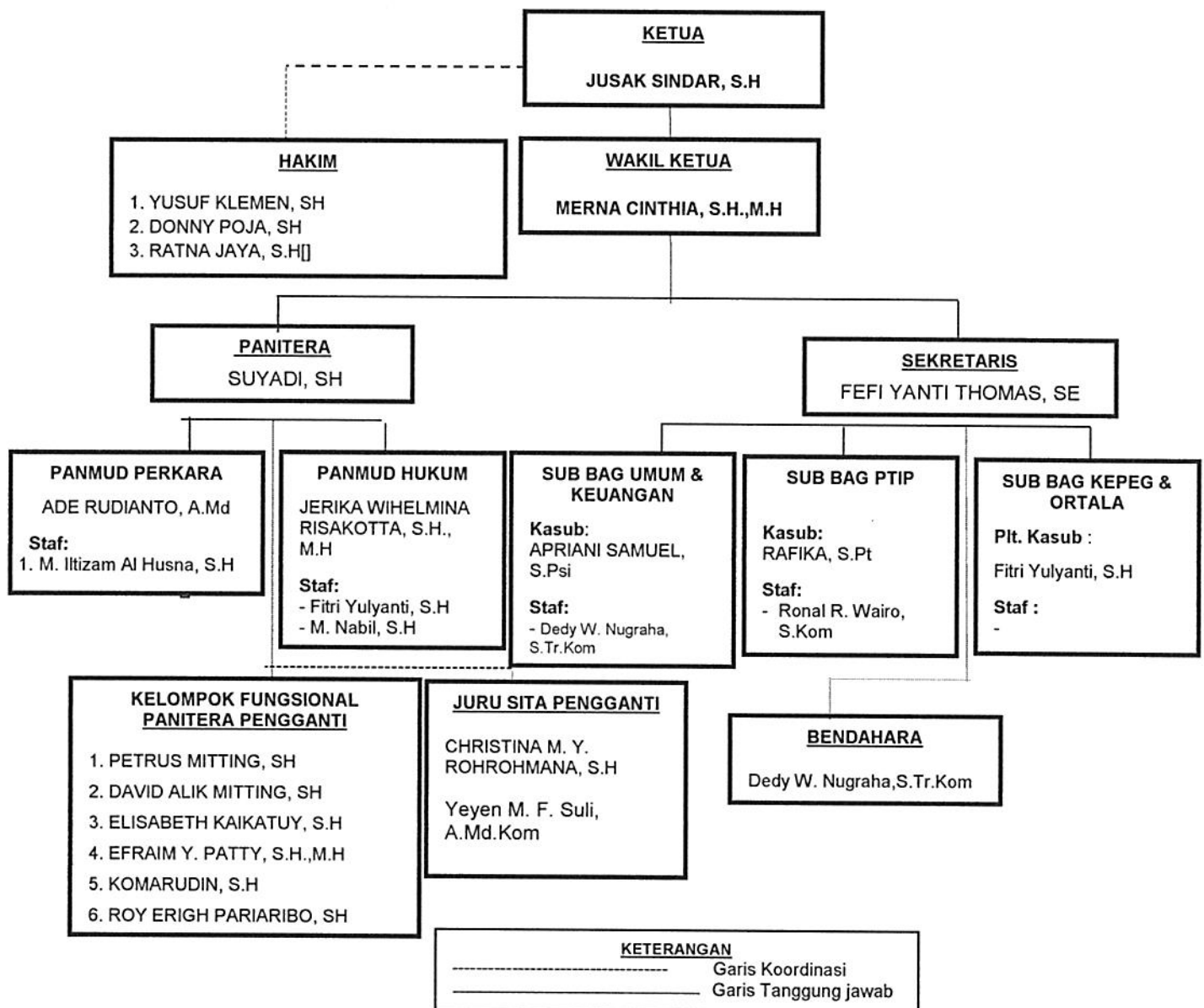
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,997,872,000
Belanja Barang	1,908,582,000
Total	5,906,454,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

a. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,997,872,000	275,371,768	2,616,297,053	1,381,574,947
2	Barang	1,901,332,000	94,249,729	1,396,505,287	504,828,713
3	Barang Non Operasional	7,250,000	0	6,380,000	870,000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,680,000	41,264,740	130,435,240	20,244,760
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

b. Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Agustus Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2,449,927	19,297,051
2	425232	Uang Meja (Leges)	110,000	990,000
3	425233	Ongkos Perkara	90,000	1,290,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	331,500	4,669,000
		Total		26,246,051

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2, halaman gedung 2000 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m2	200 m2
2	B	1993		150 m2
3	C	1992	1100 m2	70 m2
4	C	1992		70 m2
5	C	1992		70 m2
6	C	1992		70 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

**Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Proyektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan menunggu penetapan dari KPKNL Jayapura.

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan

Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	11	37
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	27	31
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	7	5
4	Kepaniteraan Perkara.	7	23
5	Kepaniteraan Hukum.	1	7

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Agustus 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	
12.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
13.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
14.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
15.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
16.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
19.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Bendahara Pengeluaran
23.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
24.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
25.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	III/d
12	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
13	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
14	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
15	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
16	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
22	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	III/a
24	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
25	CPNS	M. Nabil, S.H	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Pembuat Daftar Gaji
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Pengelola Barang Milik Negara	Bendahara Pengeluaran

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Negeri Sumenap

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Agustus mengikuti Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan.

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-

10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Lengkap	-
13	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
14	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
15	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
16	Komarudin, SH	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Lengkap	-
23	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
24	M. Iltizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
25	M. Nabil, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Agustus Tahun 2024 tidak dilakukan revisi POK DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tetapi pengesahan Alokasi Pagu Anggaran keduanya dilaksanakan pada bulan ini.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI11/I/2024

tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang untuk kesekretariatan, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 11 September 2024

KETUA



JUSAK SINDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN AGUSTUS 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPOSISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPAL TGL. DIPAL : SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAL TGL. DIPAL REVISI : SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 15 MARET 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 10 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(3/4)	TOTAL	% 8=(7/4)	TOTAL	% 10=(9/4)	TOTAL	% 11=(4/9) 12=(1/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
6988	6988	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
6988.EBA	6988.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
6988.EBA.962	6988.EBA.962	Layanan Umum										
051	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan										
A. 521219	A. 521219	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)	7.250.000	6.380.000	88,00%		0,00%	6.380.000	88,00%	870.000	12,00%	
JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003			7.250.000	6.380.000	88,00%	0	0,00%	6.380.000	88,00%	870.000	12,00%	
6988.EBA.994	6988.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
001	001	Gaji dan Tunjangan										
A. 511111	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.409.326.000	847.975.740	60,17%	97.131.820	6,89%	945.107.560	67,06%	464.218.440	32,94%	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	11.544	50,19%	1.138	4,94%	12.860	55,13%	10.320	44,87%	
511121	511121	Belanja Tunj. Suasana PNS	94.255.000	57.467.590	60,97%	6.402.040	6,79%	63.869.630	67,76%	30.385.370	32,24%	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.081.000	20.275.602	56,19%	2.290.226	6,26%	22.535.828	62,46%	13.545.172	37,54%	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34.160.000	21.060.000	61,63%	2.340.000	6,85%	23.400.000	68,50%	10.760.000	31,50%	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.447.500.000	866.250.000	59,84%	96.250.000	6,65%	962.500.000	66,49%	485.000.000	33,51%	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	342.229.000	185.581.949	54,23%	15.429.826	4,51%	201.011.775	58,74%	141.217.225	41,26%	
511126	511126	Belanja Tunj. Bersas PNS	69.850.000	42.220.860	60,45%	4.779.720	6,84%	47.000.580	67,29%	22.849.420	32,71%	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	187.310.000	92.802.000	49,54%	20.837.000	11,12%	113.639.000	60,87%	73.871.000	39,33%	
511138	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	202.343.000	115.325.000	56,99%	16.630.000	8,32%	132.155.000	65,31%	70.188.000	34,69%	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.395.000	7.955.000	48,52%	1.110.000	6,77%	9.085.000	55,29%	7.330.000	44,71%	
511157	511157	Belanja Tunjangan Kemitraan Hakim	158.400.000	84.000.000	53,03%	12.000.000	7,58%	98.000.000	60,61%	62.400.000	39,39%	
JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001			3.997.872.000	2.340.925.285	58,55%	275.371.768	6,89%	2.616.297.053	65,44%	1.381.574.947	34,56%	
002	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
A. 521111	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	583.764.000	307.854.763	52,74%	49.261.500	8,44%	357.116.263	61,17%	226.647.737	38,83%	
521811	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.100.000	61.266.790	83,81%	6.327.705	8,66%	67.584.495	92,47%	5.505.505	7,53%	
B. 521111	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	235.950.000	132.573.933	56,19%	18.402.700	7,80%	150.976.633	63,99%	84.973.367	36,01%	
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.160.000	2.485.100	12,33%	2.142.100	10,63%	4.827.200	22,95%	15.532.800	77,05%	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon	4.428.000	2.507.723	56,63%	410.604	9,27%	2.918.327	65,91%	1.509.673	34,09%	
522113	522113	Belanja Langganan Air	1.620.000	336.000	20,74%	56.000	3,46%	392.000	24,20%	1.228.000	75,80%	
522141	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5.500.000	5.239.200	95,26%		0,00%	5.239.200	95,26%	260.800	4,74%	

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
		C. 5231111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	501,660,000	497,104,503	99.09%		0.00%	497,104,503	99.09%	4,555,497	0.91%	
		523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,713,000	56,700,000	99.98%		0.00%	56,700,000	99.98%	13,000	0.02%	
		523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208,493,000	100,689,426	48.29%	17,649,120	8.47%	118,338,546	56.76%	90,154,454	43.24%	
		D. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34,152,000	34,000,000	99.55%		0.00%	34,000,000	99.55%	152,000	0.45%	
		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,712,000	27,456,000	48.41%		0.00%	27,456,000	48.41%	29,256,000	51.59%	
		H. 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119,080,000	74,042,120	62.18%		0.00%	74,042,120	62.18%	45,037,880	37.82%	
		JUMLAH KEGIATAN 6988.EBA.982	1,901,332,000	1,302,255,558	68.49%	94,249,729	4.96%	1,396,505,287	73.45%	504,826,713	26.55%	
		JUMLAH KESELURUHAN	5,906,454,000	3,649,560,843	61.79%	369,621,497	6.26%	4,019,182,340	68.05%	1,887,271,660	31.95%	
		Jumlah Anggaran	5,906,454,000									
		Realisasi Anggaran	4,019,182,340									
		Sisa Anggaran	1,887,271,660									
					Percentage							
					68.05%							
					31.95%							



 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan
 Provinsi Jawa Tengah
 Semarang
 02 September 2024
 FEF YANTI THOMAS, SE.
 NIP.19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN AGUSTUS 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROVINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(6*7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20.500.000	10.000.000	48,78%	5.000.000	24,39%	15.000.000	73,17%	5.500.000	26,83%	
	JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA		20.500.000	10.000.000	48,78%	5.000.000	24,39%	15.000.000	73,17%	5.500.000	26,83%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360.000	9.000	2,50%		0,00%	8.000	2,50%	351.000	97,50%	
	A. 521211	- Alat Tulis Kantor, Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	150.000	50.000	33,33%	70.000	46,67%	120.000	80,00%	30.000	20,00%	

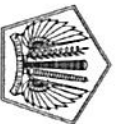
NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN TALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI	KET	
1	2	3	4	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	13
		JUMLAH KEGIATAN 1059.BCA	510,000	59,000	11.57%	70,000	13.73%	129,000	25.29%	391,000	74.71%	
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%		0.00%	2,532,000	60.29%	1,668,000	39.71%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bh)	28,800,000	14,400,000	50.00%	2,400,000	8.33%	18,800,000	58.33%	12,000,000	41.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	16,932,000	51.31%	2,400,000	7.27%	19,332,000	58.58%	13,668,000	41.42%	
N	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522191	- Belanja Jasa (Biaya uang keberstihan)	300,000	200,000	66.67%	100,000	33.33%	300,000	100.00%	0	0.00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 2 Keg)	37,007,000	24,349,500	65.80%	11,962,500	32.32%	36,312,000	98.12%	695,000	1.88%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	7,200,000	4,200,000	58.33%	3,000,000	41.67%	7,200,000	100.00%	0	0.00%	
		- Penginapan (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	25,823,000	17,530,000	67.89%	8,292,240	32.11%	25,822,240	100.00%	760	0.00%	
		- Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 2 Keg)	28,340,000	15,900,000	60.36%	10,440,000	39.64%	28,340,000	100.00%	0	0.00%	
			96,870,000	62,179,500	64.32%	33,794,740	34.96%	95,974,240	99.28%	695,760	0.72%	
		JUMLAH KESELURUHAN	150,680,000	89,170,500	59.18%	41,264,740	27.39%	130,435,240	86.56%	20,244,760	13.44%	

Jumlah Anggaran	150,680,000	Percentage
Realisasi Anggaran	130,435,240	86.56%
Sisa Anggaran	20,244,760	13.44%



 Jayapura, 02 September 2024
 Kepala Rengguna Anggaran
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
 FEBRIYANTI THOMAS, SE
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REKAP PNBP KEMENTERIAN

Bulan : Agustus

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	005	MAHKAMAH AGUNG	00501	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,449,927
GRAND TOTAL									2,449,927

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REKAP PNBK KEMENTERIAN

Bulan : Agustus

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	110,000
2	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	90,000
3	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	331,500
GRAND TOTAL									531,500

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

FORMULIR U-11

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PERSEMBAHAN	NAMA KETUA PANITIA	ACARA BUKU				ACARA BAKARAKOR CEPAT				SISA AKHIR		NOMOR PERSEMBAHAN	NOMOR PERSEMBAHAN DOKUMEN	NOMOR PERSEMBAHAN DOKUMEN	KETERANGAN		
				TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN	TANGGAL PERSEMBAHAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	16000																		

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU	PERKARA			PENGUGAT	TERGUGAT			PERLAWANAN			PUTUSAN					SISA PERKARA BULAN INI	Permohonan				Terima Berkas		KET.		
			MASUK	DICABUT	JUMLAH		PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA		DIKABULKAN	JUMLAH	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALU	EKSEKUSI		BANDING	KASASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	5	2	-	7	7	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepagawalan	2	1	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Lain - Lain	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		11	3	-	14	14	-	-	14	1	-	-	-	1	1	1	1	5	9	-	-	-	-	-	-	-	

Mengetahui :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

Jayapura, 30 Agustus 2024

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Formulir LI - T3

No.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	BIAYA PERKARA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

Mengetahui :

Jayapura, 30 Agustus 2024

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



JUSAK SINDAR

PANTERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



SODIK

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN AGUSTUS 2024

Formulir II - TA

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	01-08-2024	Abihud Waroni	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082198812388, Jln Raya Abe Pantai Enggros Belikang Kantor Lurah Wai Mihorok, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Sertifikat Ganda	
2	-	05-08-2024	Susanty Manulang		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Hak Waris	
3	-	06-08-2024	Diana Adadikam		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait pekar ailit	
4	-	07-08-2024	Siti Komariah		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
5	-	12-08-2024	Cornelius Sampe		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
6	-	13-08-2024	Yuswardi		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
7	-	16-08-2024	Deminus Sada		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
8	-	20-08-2024	Rafael Ridwan May		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
9	-	21-08-2024	Rusdi Boeng		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
10	-	26-08-2024	M. Fasmari		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	
11	-	28-08-2024	Paliki Towolom		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Pemilu penggelembungan suara	
12	-	02/08/2024	Yustinus Tura		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Perselisihan Hubungan Industrial	

Jayapura, 30 Agustus 2024

Mengesahkan:
KETUA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

PANITERA
Pengadilan Tata Usaha Negara

SUYADI

BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Formulir L1-T5

[illegible]

Mengetahui :

Jayapura, 30 Agustus 2024

KETUA

Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

PANITERA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

SDYAD



LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN AGUSTUS 2024

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPRISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPAI/TOL DIPAI : SP DIPAI-005 05 2 539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAI/TOL DIPAI REVISI : SP DIPAI-005 01 2 539139/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPAI-005 01 2 539139/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELAJARAN	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8/7)	10=(9/4)	11=(12/9)	12=(11/4)	13
	005.03.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN KUALITAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	081	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	Berupa Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%	0	0.00%	2,532,000	60.29%	1,668,000	39.71%	
	A. 52131	Berupa Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 br)	28,800,000	14,400,000	50.00%	2,400,000	8.33%	16,800,000	58.33%	12,000,000	41.67%	
	JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA		33,000,000	16,932,000	51.31%	2,400,000	7.27%	19,332,000	58.68%	13,668,000	41.42%	

Jumlah Anggaran	33,000,000	Percentage
Realisasi Anggaran	19,332,000	58.58%
Sisa Anggaran	13,668,000	41.42%

Jayapura, 30 Agustus 2024
Ketua Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
FELIYANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200804 2 002

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28,762,000	-	-	28,762,000
2	Penerimaan	-	2,783,500	-	2,783,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	136,000	136,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	630,000	630,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	390,000	390,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	1,019,000	1,019,000
9	Materai	-	-	50,000	50,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	90,000	90,000
	b. Redaksi	-	-	50,000	50,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	278,500	278,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	2,222,000	2,222,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28,762,000	2,783,500	5,240,500	26,305,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	8,070,500	-	-	8,070,500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	8,070,500	375,000	-	8,445,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,295,000	-	-	1,295,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	160,000	160,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	50,000	50,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	25,000	25,000
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,295,000	500,000	295,000	1,500,000

Jayapura, 30 Agustus 2024

MENGETAHUI :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SOYADI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

BENDAHARA PERKARA

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A 1	Saldo Bulan Lalu	Rp	28.762.000	
2	Jumlah Penerimaan	Rp	2.783.500	
3	Jumlah Pengeluaran	Rp	5.240.500	
4	Saldo Pembukuan	Rp	26.305.000	
5	Saldo			Rp 26.305.000

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

1	Uang Tunai	Rp	6.742.100	
2	Saldo Bank	Rp	19.562.900	
3	Surat Berharga	Rp	-	
4	Meterai	Rp	- (+)	
5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 26.305.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas			
	Uang Kertas =	100.000 x 66 lbr	Rp	6.600.000
		50.000 x 2 lbr	Rp	100.000
		20.000 x 2 lbr	Rp	40.000
		2.000 x 1 lbr	Rp	2.000
	Uang Logam			
		100 x 1	Rp	100
	Meterai	-	Rp	- (+)
	Jumlah			Rp 6.742.100

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1	Uang Tunai di Brankas			
	Uang Kertas =	100.000 x 15 lbr	Rp	1.500.000

Jumlah Rp 1.500.000

Yang diperiksa
Kas Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 30 Agustus 2024
Pemeriksa
Panitera

SUYADI, S.H.
NIP. 197205151994031002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI - WAENA - JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) - 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T8

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	28.762.000	-	-	28.762.000
2	Penerimaan		2.783.500	-	2.783.500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375.000	375.000
4	Biaya Panggilan	-	-	136.000	136.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	630.000	630.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	390.000	390.000
8	Biaya Pengiriman	-	-	1.019.000	1.019.000
9	Materai	-	-	50.000	50.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	90.000	90.000
	b. Redaksi	-	-	50.000	50.000
	c. PNBP lain-lain	-	-	278.500	278.500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	2.222.000	2.222.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28.762.000	2.783.500	5.240.500	26.305.000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	8.070.500	-	-	8.070.500
2	Penerimaan		375.000	-	375.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	8.070.500	375.000	-	8.445.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	1.295.000	-	-	1.295.000
2	Penerimaan	-	500.000	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi			-	-
4	ATK Eksekusi			50.000	-
5	Materai	-	-	10.000	10.000
6	Biaya Surat Panggilan			160.000	160.000
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	50.000	50.000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	25.000	25.000
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1.295.000	500.000	295.000	1.500.000



Jayapura, 30 Agustus 2024
MASIR

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Kepada Yth. / To :

**RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA
PERKARA**
JALAN RAYA SENTANI WAENA
RL.001/001,RL.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan
Statement Date : 02/09/24

Periode Transaksi
Transaction Period : 01/08/24 - 31/08/24

No. Rekening
Account No : 214201000003307

Unit Kerja
Business Unit : KCP WAENA

Nama Produk
Product Name : Giro Tres.NolP

Alamat Unit Kerja
Business Unit Address : WAENA
JAYAPURA

Valuta
Currency : IDR

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
06/08/24 16:43:37	BRVA19845493240600002 RIJOPOTAN,EMRIIDJA 20240606EMRIIDJA01000226871475 ESB.BFST:0008N:2024060697815359	8888056	0.00	10,000.00	26,789,400.00
11/08/24 18:53:10	BRVA19845493240600004 INEMBYULIUS DOMINGG BRVA 19845493240600004INEMBYULIUS DOMINGG ESB.NEMB.0200200P:720724176949	8888282	0.00	10,000.00	26,799,400.00
12/08/24 07:55:18	BRVA19845493240600003ATMOAGUSTINUS SH M BRVA 19845493240600003ATMOAGUSTINUS SH ESB.ATMO.000CB00P:160805012144	9903917	0.00	865,000.00	27,664,400.00
14/08/24 12:04:13	ESB.INDS.0002AC0W.W68b1099tcb3	4920052	10,000,000.00	0.00	17,664,400.00
16/08/24 11:58:43	BRVA19845493240600006 THOMAS PE:EMRIIDJA 20240816EMRIIDJA01000220808112 ESB.BFST:0008N:2024081658463166	8888667	0.00	865,000.00	18,529,400.00
19/08/24 16:32:57	ATMLTRPRM 00057588119845493240600008 TRF PRIMA FROM	0888767	0.00	14,500.00	18,543,900.00
20/08/24 07:45:22	BRVA19845493240600009 FITRIJANY :EMRIIDJA 20240820EMRIIDJA0100027765765 ESB.BFST:0008N:2024082017639423	8888669	0.00	865,000.00	19,408,900.00
20/08/24 15:42:54	BRVA19845493240600010INEMBYULIUS DOMINGG BRVA 19845493240600010INEMBYULIUS DOMINGG ESB.NEMB.0200200P:721145972110	8888278	0.00	13,000.00	19,421,900.00
29/08/24 10:37:53	BRVA19845493240600013NEMBOUPATI TOLIKAR BRVA 19845493240600013NEMBOUPATI TOLIKAR ESB.NEMB.0200200P:727609328894	8888098	0.00	10,000.00	19,431,900.00
29/08/24 10:42:17	BRVA19845493240600014NEMBOUPATI TOLIKAR BRVA 19845493240600014NEMBOUPATI TOLIKAR ESB.NEMB.0200200P:727611033567	8888147	0.00	10,000.00	19,441,900.00
29/08/24 13:25:29	ATMLTRPRM 00060758319845493240600016 TRF PRIMA FROM	0888020	0.00	47,000.00	19,488,900.00
30/08/24 10:21:32	ATMLTRPRM 00090694619845493240600018 TRF PRIMA FROM	0888900	0.00	58,000.00	19,546,900.00



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Urutan Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
31/08/24 07:28:09	BTST214201000003307/MADE DWI SAN:CENAIDJA 20240831CENAIDJA01000216658175 ESB:BTST.0008N:20240831FASTIDJA01098769381	8888082	0.00	16,000.00	19,562,900.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
26,779,400.00	10,000,000.00	2,783,500.00	19,562,900.00

Terbilang / In Words

SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS ENAH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH
NINETEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY TWO THOUSAND NINE HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In case of any difference from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of the statement of account.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- The copy of this Statement of Account is computer generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI.
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit.

Created by BRUSM
09-02-2024 09:26:57 AM